



RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMBELANGAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023

BAB I PENDAHULUAN

1 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

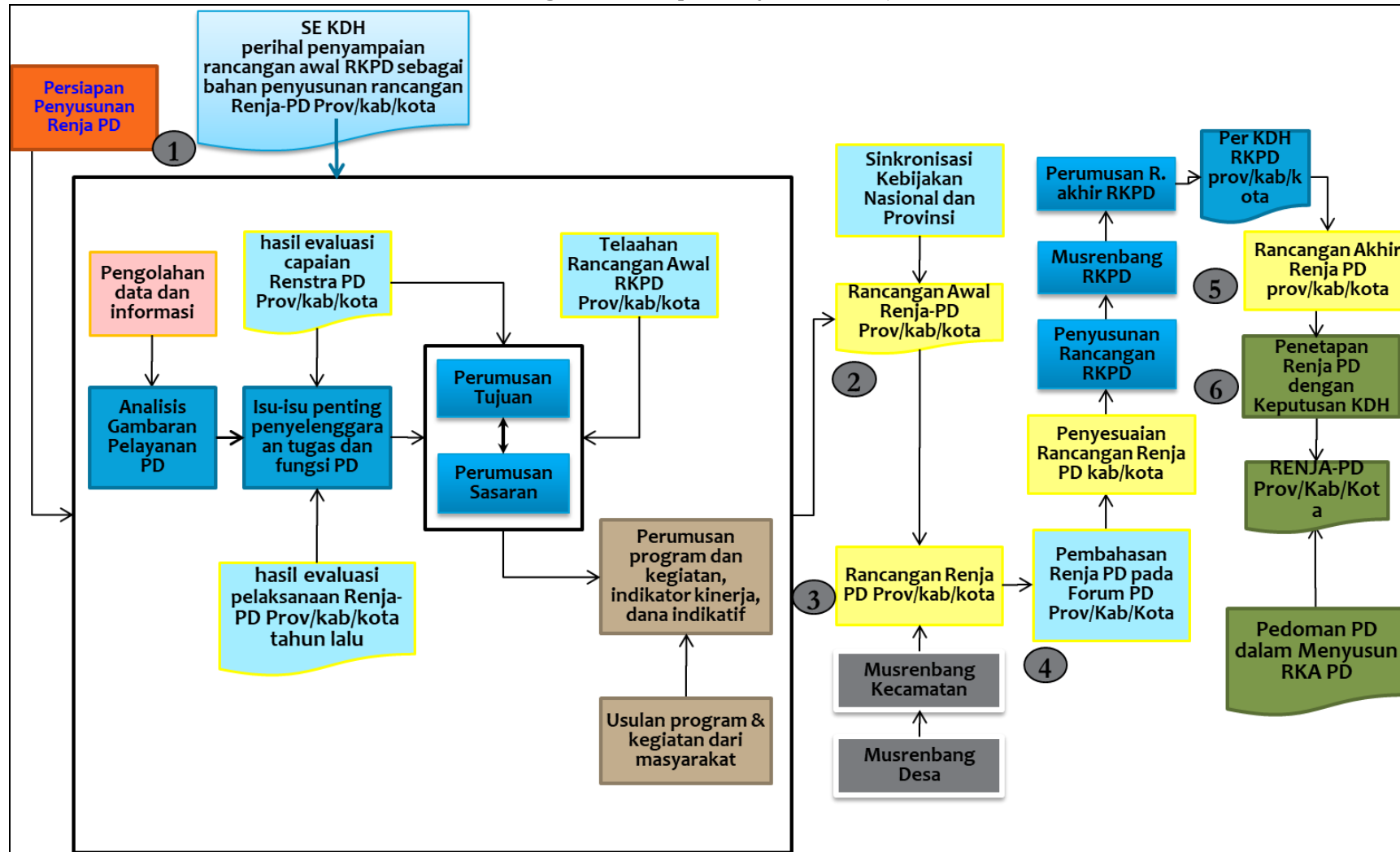
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Tambelangan
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2024.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**.

2 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

-
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

-
- untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

-
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
 27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

-
- Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
 38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023..

3 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tambelangan Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambelangan Tahun 2023 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

4 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-dua pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Tambelangan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelangan sebesar Rp. 2.337.667.146,-. Total terealisasi sebesar Rp. 2.200.396.183,- (94,13%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (Lima) program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%	Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA							
	Sasaran RPJMD :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM	81,50	80,51	98,79%
	Sasaran Renstra :							

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM Kecamatan Tambelangan	81,50	80,51	98,79%
	BELANJA LANGSUNG (BL)	2.337.667.146	2.200.396.183	94,13 %		100%	94,68 %	94,68 %
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.222.884.249	2.104.674.133	94,68 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	100%	94,68 %	94,68 %
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	20.043.447	10.359.500	52 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100 %
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.874.091	1.813.000	96,74 %	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	3 Dok	3 Dok	100 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.490.417	1.391.000	93,33 %	Jumlah Dok. RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.966.136	1.859.000	94,55 %	Jumlah Dok DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	303.944	300.000	98,70 %	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.408.859	4.996.500	34,68 %	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	4 Dok	4 Dok	100 %
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.739.818.126			Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100 %
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.737.686.204	1.705.565.293	98,15 %	Jumlah Pegawai ASN	19 ASN	19 ASN	100 %
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.723.548	1.279.800	74,25 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	408.374	375.750	92,01 %	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Dok	4 Dok	100 %
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.097.722	-	0%	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	0%	0%
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.097.722	-	0%	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek Implementasi Perundang – Undangan	1 OK	-	0%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.013.400			Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	86,24 %	86,24 %
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.099.722	3.255.729	79,41 %	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	9 Jenis	8 Jenis	88,89 %
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.408.312	12.770.600	88,63 %	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18 Jenis	15 Jenis	83,33 %

12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.004.484	17.886.200	74,51 %	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	30 Jenis	28 Jenis	93,3 %
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.702.250	7.219.250	74,41 %	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	50 Dok	15 Dok	30%
					Jumlah Belanja Penggandaan yang disediakan	6 Dok	6 Dok	100 %
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.680.000	93,33 %	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
15	Fasilitasi Kunjangan Tamu	7.200.000	6.732.000	93,50 %	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjangan Tamu	120 OK	120 Ok	100 %
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.915.367	25.673.752	58,46 %	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	360 OK	360 Ok	100 %
					Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	96 Kali	87 Kali	90,6 %
					Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	5 Kali	5 Kali	100 %
					Jumlah Kebutuhan BBM	80 Liter	50 Liter	62,5 %
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.603.308	103.659.000	95,45 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100 %
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	61.200.000	92,73 %	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	1 Unit	1 Unit	100 %
18	Pengadaan Mebel	8.103.308	7.990.000	98,60 %	Jumlah Pengadaan Meubelair	2 Buah	2 Buah	100 %
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	34.469.000	99,91 %	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	2 Buah	2 Buah	100 %
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.782.460	42.064.392	62,99 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	99,17 %	99,17 %
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.395.260	2.336.050	97,53 %	Jumlah surat yang terkirim	400 Surat	390 Surat	97,5 %
21	Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik, Sumber Daya Air dan Listrik	31.387.200	6.728.342	21,44 %	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100 %
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.000.000	33.000.000	100%	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	12 Bulan	12 Bulan	100 %

G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.310.000	157.259.917	92,34 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	87,67 %	87,67 %
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	4.200.000	1.149.000	27,36 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	12 Unit	7 Unit	58,33 %
24	Pemeliharaan Mebel	1.600.000	1.090.000	68,13 %	Jumlah mebel yang dipelihara	30 Buah	24 Buah	80%
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	3.700.450	37%	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100 %
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.510.000	26.949.917	91,32 %	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	100 %
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	124.371.000	99,50 %	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100 %
H	Penataan Organisasi	9.099.426	8.892.500	97,73 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100 %
28	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.099.426	8.892.500	97,73 %	Jumlah dokumen SKM	1 Dok	1 Dok	100 %
					Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	2 Kali	2 Kali	100 %
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.778.348	4.340.500	75,12 %	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	95%	95%
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerinrahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	5.778.348	4.340.500	75,12 %	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	95%	95%
29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.778.348	4.340.500	75,12 %	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	100%	95%	95%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.793.869	58.137.250	88,36 %	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	70%	70%	100 %
J	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.793.869	58.137.250	88,36 %	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	70%	70%	100 %

30	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	18.070.194	17.783.000	98,41 %	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	10 Desa	10 Desa	100 %
31	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.723.675	40.354.250	84,56 %	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	3 Desa	2 Desa	66,67 %
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.675.000	18.545.250	99,31 %	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20%	19%	95%
K	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.675.000	18.545.250	99,31 %	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20%	19%	95%
32	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.675.000	18.545.250	99,31 %	Jumlah Satlinmas Desa yang Aktif	10 Desa	10 Desa	100 %
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.535.680	14.699.050	83,11 %	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	100%	60%	60%
L	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	24.535.680	14.699.050	83,11 %	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	100%	60%	60%
33	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.617.840	11.318.050	83,11 %	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	10 Desa	10 Desa	100 %
34	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.917.840	3.381.000	30,97 %	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 Desa	10 Desa	100 %
	JUMLAH BL	2.337.667.146	2.200.396.183	94,13 %				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 94,13 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Tambelangan sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2021-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2021-2024 memuat 5 (Lima) program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tambelangan sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tambelangan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Sasaran:	7.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	12.235.501.412	100	2.031.255.830	100	2.222.884.249	100	2.104.674.133	200	4.135.929.963	200%	33,80%	Kec. Tambelangan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	121.552.012	100	21.941.000	100	20.043.447	100	10.359.500	50	32.300.500	50%	26,57%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	3	22.196.364	3	5.400.000	3	1.874.091	3	1.813.000	6	7.213.000	200%	32,50%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	1	12.821.668	1	3.083.750	1	1.490.417	1	1.391.000	2	4.474.750	200%	34,90%	Kec. Tambelangan

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Saasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
	7.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	1	14.464.768	1	3.516.000	1	1.966.136	1	1.859.000	2	5.375.000	200%	37,16%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD	1	4.153.776	1	1.013.500	1	303.944	1	300.000	2	1.313.500	200%	31,62%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	4	67.915.436	4	8.927.750	4	14.408.859	4	4.996.500	8	13.924.250	200%	20,50%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	10.174.660.786		1.713.149.541	100	1.739.818.126	100	1.707.220.843	25	3.420.370.384	25%	33,62%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	25	22.196.364	21	1.696.274.291	25	1.737.686.204	78	1.705.565.293	99	3.401.839.584	396%	33,57%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Penyediaan ATK	0	24.311.406	26	14.539.500	0	-	0	-	26	14.539.500	0%	59,81%	Kec. Tambelangan

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Saasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
		ASN														
	7.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	11.794.192	1	1.225.000	1	1.723.548	1	1.279.800	2	2.504.800	200%	21,24%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	4.573.496	3	1.110.750	4	408.374	4	375.750	7	1.486.500	233%	32,50%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	23.840.000	0	0	100	3.097.347	0	-	0	-	0%	0,00%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	1	23.840.000	0	0	1	3.097.347	0	-	0	-	0%	0,00%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.06.	Adminstrasi Umum Perangkat	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	378.855.810	100	32.013.400	100	105.130.135	100	75.217.531	25	107.230.931	25%	28,30%	Kec. Tambelangan

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Saasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
	7.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	9	17.879.212	4	1.674.000	9	4.099.722	8	3.255.729	12	4.929.729	133%	27,57%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18	52.596.148	10	7.548.000	18	14.408.312	15	12.770.600	25	20.318.600	139%	38,63%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	30	72.934.218		0	30	24.004.484	28	17.886.200	28	17.886.200	93%	24,52%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	1	10.000.000	1	1.000.000	50	2.500.000	15	430.000	16	1.430.000	1600%	14,30%	Kec. Tambelangan
			Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	50	28.305.200	3	3.698.400	6	7.202.250	6	6.789.250	9	10.487.650	18%	37,05%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	7.200.000	12	1.680.000	12	1.800.000	10	1.680.000	22	3.360.000	183%	46,67%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	120	19.200.000	88	4.356.000	120	7.200.000	114	6.732.000	202	11.088.000	168%	57,75%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	360	25.200.000	60	6.237.000	360	7.200.000	360	6.384.500	420	12.621.500	117%	50,09%	Kec. Tambelangan

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Saasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd sampai dengan RKPd Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	96	50.508.000	38	3.850.000	96	12.773.000	87	6.634.000	125	10.484.000	130%	20,76%	Kec. Tambelangan
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	5	67.200.000	2	1.970.000	5	14.400.000	5	4.100.000	7	6.070.000	140%	9,03%	Kec. Tambelangan
			Jumlah kebutuhan BBM	804	27.833.032	0	0	80	9.542.367	50	8.555.252	50	8.555.252	6%	30,74%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	729.834.428		160.066.250	100	108.603.308	100	103.659.000	0	263.725.250	0%	36,13%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	1	264.000.000	1	62.400.000	1	66.000.000	1	61.200.000	2	123.600.000	200%	46,82%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelair	25	68.929.300	24	16.350.000	2	8.103.308	2	7.990.000	26	24.340.000	104%	35,31%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	6	396.905.128	11	81.316.250	2	34.500.000	2	34.469.000	13	115.785.250	217%	29,17%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan	Presentase penunjang	100	225.955.048		42.105.639	100	66.782.460	95	42.064.3	35	84.170.0	35%	37,25%	Kec. Tambelangan

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Saasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
		Pemerintahan Daerah	urusan pemerintah daerah yang difasilitasi								92		31			angan
	7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	400	10.025.176	700	2.350.000	400	2.395.260	390	2.336.050	1090	4.686.050	273%	46,74%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12	83.929.872	11	6.755.639	12	31.387.200	12	6.728.342	23	13.483.981	192%	16,07%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	12	132.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	10	33.000.000	22	66.000.000	183%	50,00%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	430.832.856		61.980.000	100	170.310.000	80	157.260.367	0	219.240.367	0%	50,89%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	12	16.800.000	8	1.157.000	12	4.200.000	7	1.149.000	15	2.306.000	125%	13,73%	Kec. Tambelangan

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Saasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
	7.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebeler	Jumlah mebeler yang dipelihara	20	6.400.000	10	575.000	20	1.600.000	14	1.090.000	24	1.665.000	120%	26,02%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	30	42.400.000	15	5.650.000	30	10.000.000	24	3.700.450	39	9.350.450	130%	22,05%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3	240.232.856	2	54.598.000	3	29.510.000	3	26.949.917	5	81.547.917	167%	33,95%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana Kantor yang direhab	1	125.000.000	0	0	1	125.000.000	1	124.371.000	1	124.371.000	100%	99,50%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	149.970.472	0	0	100	9.099.426	100	8.892.500	0	8.892.500	0%	5,93%	Kec. Tambelangan
	7.01.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	1	1.411.872	0	0	1	463.776	1	305.000	1	305.000	100%	21,60%	Kec. Tambelangan
			Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	2	148.558.600	0	0	2	8.635.650	2	8.587.500	2	8.587.500	100%	5,78%	Kec. Tambelangan
Meningkatnya	7.01.02.2.	PROGRAM PENYELENGGARA	Persentase rekomendasi	100	11.593.392	99	2.646.500	100	5.778.34	95	4.340.50	99	6.987.00	99%	60,27%	Kec. Tambel

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Saasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
kualitas pelayanan tingkat kecamatan		AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu						8		0		0			angan
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yg ada di Kec.	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	11.593.3 92	99	2.646.50 0	100	5.778.34 8	95	4.340.50 0	99	6.987.00 0	99%	60,27%	Kec. Tambela ngan
	7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	100	11.593.3 92	99	2.646.50 0	100	5.778.34 8	95	4.340.50 0	194	6.987.00 0	194%	60,27%	Kec. Tambela ngan
Meningkat nya kemajuan dan kemandiria n desa	07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	70	234.696. 381	70	59.213.7 50	70	65.793.8 69	70	58.137.2 50	35	117.351. 000	50%	50,00%	Kec. Tambel angan
	07.01.03.2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	70	234.696. 381	70	59.213.7 50	70	65.793.8 69	70	58.137.2 50	35	117.351. 000	50%	50,00%	Kec. Tambel angan
	07.01.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah usulan program kegiatan	10	73.267.1 82	10	19.096.7 50	10	18.070.1	10	17.783.0	20	36.879.7	200%	50,34%	Kec. Tambela

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Saasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	pembangunan desa yang difasilitasi						94		00		50			ngan
	07.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	3	161.429.199	3	40.117.000	3	47.723.675	2	40.354.250	5	80.471.250	167%	49,85%	Kec. Tambelangan
Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20	55.221.334	20	31.186.500	20	18.675.000	19	18.545.250	20	49.731.750	100%	90,06%	Kec. Tambelangan
	7.01.04.2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20	55.221.334	20	31.186.500	20	18.675.000	19	18.545.250	20	49.731.750	100%	90,06%	Kec. Tambelangan
	7.01.04.2.01.01.	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Satlinmas Desa yang Aktif	10	55.221.334	10	31.186.500	10	18.675.000	7	18.545.250	17	49.731.750	170%	90,06%	Kec. Tambelangan
Meningkatnya tata kelola	7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan	100	111.617.749	0	0	100	24.535.680	60	14.699.050	0	14.699.050	0%	13,17%	Kec. Tambelangan

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Saasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
pemerintah an desa		PEMERINTAHAN DESA	Desa													
	7.01.06.2.	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	100	111.617. 749	0	0	100	24.535.6 80	60	14.699.0 50	0	14.699.0 50	0%	13,17%	Kec. Tambela ngan
	7.01.06.2.01.02.	Fasilitasi Adminstrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	10	17.787.0 00	0	0	10	13.617.8 40	7	11.318.0 50	7	11.318.0 50	70%	63,63%	Kec. Tambela ngan
	7.01.06.2.01.01.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	0	7.517.84 0	0	0	0	0	0	-	0	-	0%	0,00%	Kec. Tambela ngan
	7.01.06.2.01.03.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10	32.753.5 20	0	0	10	10.917.8 40	8	3.381.00 0	8	3.381.00 0	80%	10,32%	Kec. Tambela ngan
	7.01.06.2.01.06.	Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	10	53.559.3 89	0	0	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Kec. Tambela ngan

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tambelangan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2022 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Kecamatan Tambelangan yang baru.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tambelangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambelangan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu				100	100	100	-	95	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif				20	20	20		20	50	50	
4	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi				100	100	100		100	100	100	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Tambelangan sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tambelangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Tambelangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambelangan berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tambelangan secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KECAMATAN TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN TAMBELANGAN TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			100 %	
7.01.07.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				2.065.159	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		2.065.159		
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	516.893	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	516.893
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	434.793	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	434.793
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	147.698	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	147.698
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	275.736	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	275.736
7.01.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	5 dok	690.039	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	5 dok	690.039
7.01.07.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah				1.856.417.195	Administrasi keuangan perangkat daerah				1.856.417.195

7.01.07.01. 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Tambelangan	Jumlah ASN	25 OB	1.855.707.344	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Tambelangan	Jumlah ASN	25 OB	1.855.707.344
7.01.07.01. 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	546.856	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	546.856
7.01.07.01. 2.02.07	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulanan /triwulan/semester	Kec. Tambelangan	Jumlah laporan bulanan /triwulan/semester	3 Dok	162.995	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulanan /triwulan/semester	Kec. Tambelangan	Jumlah laporan bulanan /triwulan/semester	3 Dok	162.995
7.01.07.01. 2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Tambelangan			65.431.554	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Tambelangan			65.431.554
7.01.07.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tambelangan	Jumlah komponen listrik	9 Paket	2.039.878	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tambelangan	Jumlah komponen listrik	9 Paket	2.039.878
7.01.07.01. 2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tambelangan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Paket	6.813.030	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tambelangan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Paket	6.813.030
7.01.07.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tambelangan	Jumlah ATK yang disediakan	30 Paket	13.198.881				30 Paket	13.198.881
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tambelangan	a) Jumlah barang cetakan yang disediakan b) Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	a) 6 Paket b) 50 Lmbr	2.087.765	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tambelangan	a) Jumlah barang cetakan yang disediakan b) Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	a) 6 Paket b) 50 Lmbr	2.087.765
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec. Tambelangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Dok	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec. Tambelangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Dok	1.800.000
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tambelangan	a) Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat b) Jumlah Rapat koordinasi dan	a. 360 OK; b. 48 OK; c. 12 OK; d. 968	39.492.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tambelangan	a) Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	a. 360 OK; b. 48 OK; c. 12 OK; d. 968	39.492.000

			Konsultasi Dalam Daerah c) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah d) Kebutuhan Pelumas	Liter				b) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah c) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah d) Kebutuhan Pelumas	Liter	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelangan		100%	77.806.298	Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelangan		100%	66.000.000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tambelangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tambelangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Tambelangan	Jumlah Pengadaan Meubilair	2 Unit	3.438.323	Pengadaan Mebel	Kec. Tambelangan	Jumlah Pengadaan Meubilair	2 Unit	3.438.323
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambelangan	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	1 unit	8.367.975	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambelangan	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	1 unit	8.367.975
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelangan		100 %	44.251.699	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelangan		100 %	44.251.699
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tambelangan	Jumlah surat terkirim	400 Laporan	394.199	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tambelangan	Jumlah surat terkirim	400 Laporan	394.199
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tambelangan	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	12 Laporan	4.857.500	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tambelangan	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	12 Laporan	4.857.500
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tambelangan	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	39.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tambelangan	a.Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b.Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	39.000.000

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelangan		100%	14.150.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelangan		100%	14.150.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambelangan	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	12 Unit	1.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambelangan	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	12 Unit	1.750.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambelangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30 Unit	2.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambelangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30 Unit	2.800.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tambelangan	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 unit	9.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tambelangan	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 unit	9.600.000
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Kec. Tambelangan		100 %	3.260.099	Penataan Organisasi	Kec. Tambelangan		100 %	3.260.099
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Tambelangan	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 kali 1 dok	3.260.099	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Tambelangan	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 kali 1 dok	3.260.099
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tambelangan		100%	314.656	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tambelangan		100%	314.656
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Tambelangan		100%	314.656	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Tambelangan		100%	314.656
7.01.02.2.02.02	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tambelangan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	1 Dok	314.656	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tambelangan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	1 Dok	314.656

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tambelangan		68%	44.597.985	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tambelangan		68%	44.597.985
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tambelangan		68%	44.597.985	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tambelangan		68%	44.597.985
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tambelangan	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	10 Desa	13.243.085	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tambelangan	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	10 Desa	13.243.085
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambelangan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	3 Laporan	31.354.900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambelangan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	3 Laporan	31.354.900
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tambelangan		20 %	5.456.018	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tambelangan		20 %	5.456.018
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tambelangan		20%	5.456.018	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tambelangan		20 %	5.456.018
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambelangan	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	10 desa	729.049	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambelangan	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	10 desa	729.049
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tambelangan	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4.726.969	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tambelangan	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4.726.969
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tambelangan		100%	676.460	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tambelangan		100 %	676.460

7.01.06.2.01.	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDES	Kec. Tambelangan		100%	676.460	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDES	Kec. Tambelangan		100 %	676.460
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tambelangan	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	10 dok	400.000	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tambelangan	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	10 dok	400.000
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Tambelangan	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 dok	276.460	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Tambelangan	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 dok	276.460

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2023 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Tambelangan Tahun 2023

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan Tambelangan Tahun 2023

Perangkat Daerah : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Tambelangan pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan Tema “**Peningkatan dan Pemetaan Infrastruktur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Mendukung Daya Saing Daerah Menuju Sampang Hebat Bermartabat**”.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tambelangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tambelangan Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambelangan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tambelangan pada Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
	Tujuan 1		
	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks gini	3,50 0,261
	Sasaran 1		

Renja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2023

	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa		Indeks Desa Membangun	0.722
	Tujuan 2			
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public		Indeks Reformasi Birokrasi	62,01
	Sasaran 2.1			
	Meningkatnya kualitas pelayanan public		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00
	Sasaran 2.2			
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	88,89
	Tujuan 3			
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik		Indeks Toleransi	3,77
	Sasaran 3			
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik		Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20%

5

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2023

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Tambelangan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Tambelangan mendukung pada pencapaian :

- 1 Misi 2 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 2 Misi 4 yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
- 3 Misi 5 yaitu Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.

Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tambelangan yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024, Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2, 4 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
4. Sasaran 4 yaitu Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Adapun program yang mendukung pada sasaran-sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 6 kegiatan dan 23 sub kegiatan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 sub kegiatan dan 2 sub kegiatan

Program-program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tambelangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada table T-C. 33 sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tambelangan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi **SIPD Kabupaten Sampang.**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Tambelangan mengampu Urusan Kewilayahan, Program Kecamatan Tambelangan pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tambelangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tambelangan Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			2.114.427.123
7.01.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD		100 %	2.065.159
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	516.893
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	434.793
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	147.698
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	275.736
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	5 dok	690.039
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.856.417.195
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	25 OB	1.855.707.344
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	546.856
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan bulananan / triwulan /semester	3 dok	162.995
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah		100%	65.431.554
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	9 Paket	2.039.878

7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Paket	6.813.030
7.01.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	30 Paket	13.198.881
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a) Jumlah barang cetakan yang disediakan b) Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	a) 6 Paket b) 50 Lembar	2.087.765
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Dokumen	1.800.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a) Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat b) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah c) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah d) Kebutuhan Pelumas	a. 360 OK; b. 48 OK; c. 12 OK; d.968 Liter	39.492.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	77.806.298
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang disediakan	1 unit	66,000,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubilair	2 Unit	3.438.323
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	1 unit	8.367.975
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	44.251.699
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	400 Laporan	394.199
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Airdan Listrik	12 Laporan	4.857.500
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	c) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor d) Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	39.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	14.150.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Jasa Perizinan	12 Unit	1.750.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	30 unit	2.800.000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 unit	9.600.000
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi		100%	3.260.099
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 kali 1 dok	3.260.099
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	314.656
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	314.656
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	1 Dokumen	314.656
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		68%	44.597.985
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		68%	44.597.985
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	10 Desa	13.243.085
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa binaan PKK	3 Laporan	31.354.900
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		20%	5.456.018
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		20%	5.456.018
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah satlinmas desa yang aktif	10 desa	729.049
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4.726.969
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	676.460
7.01.06.2.01.	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDES		100%	676.460
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	10 Dokumen	400.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 Dokumen	276.460

Pada Tahun 2023 Kecamatan Tambelangan akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.114.427.123,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program , 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Tambelangan dan lingkup Kabupaten Sampang.

4.2 Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2023

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya inovasi yang digagas akan dilaksanakan dan dikembangkan pada ;tahun 2023 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan antara lain :

1. SIDIAH (*Sistem Informasi Dokumentasi Kinerja Harian*)

Aplikasi SIDIAH (sistem informasi dokumentasi kinerja harian) adalah aplikasi yang disematkan pada smartphone yang dapat digunakan untuk menginput kegiatan sehari-hari, dilengkapi dokumentasi, laporan kegiatan, pimpinan langsung bisa menyetujui kegiatan yang diinput oleh PNS, kegiatan yang diinput bisa diketahui oleh seluruh PNS dilingkungan Kecamatan Tambelangan. Dengan adanya aplikasi ini setiap PNS terpantau kegiatan sehari harinya secara online.



2. SAJAM SAKTI

Bentuk inovasi kerja bakti satu jam sebelum melakukan kegiatan pelayanan masyarakat yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Tambelangan dengan melibatkan stakeholder disekitar Kecamatan Tambelangan termasuk semua Desa.



3. KOST MABEDE (Kotak Saran Maju Bersama Desa)

Inovasi KOST MABEDE (Kotak Saran Maju Bersama Desa) merupakan sarana atau suatu wadah yang digunakan untuk menampung kritik, saran dan keluhan warga dan masyarakat Desa.



4. 100 % LUNAS

Inovasi ini merupakan terobosan Kantor Kecamatan Tambelangan dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan PBB .



5. SI PATAS

Kegiatan Pelayanan SI PATAS (Simple, Cepat, dan Tuntas) ini merupakan terobosan Kantor Kecamatan Tambelangan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dengan Simple, Cepat, dan Tuntas.



BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public
3. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99,94% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tambelangan Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambelangan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024. Adapun sasaran Kecamatan Tambelangan adalah :

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
4. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Pada tahun 2023 Kecamatan Tambelangan akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.114.427.123,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Tambelangan dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2023, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Sampang, Desember 2023

CAMAT TAMBELANGAN



SYAMSUL BAHRI, S.Si, MM

